

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

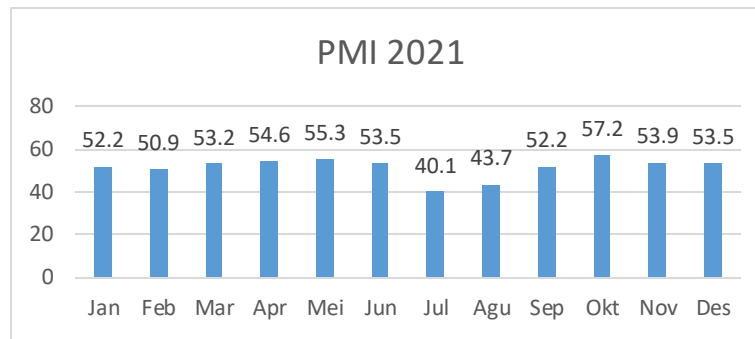
Pada era globalisasi, ketika tingkat persaingan menjadi semakin ketat akan memberikan tekanan bagi berbagai pihak baik individu, kelompok, atau organisasi untuk meningkatkan performa dan bersaing guna mempertahankan eksistensinya. Sebagai bentuk dari organisasi, perusahaan dituntut untuk meningkatkan kualitasnya dengan mengelola perusahaan secara professional. Dari sudut pandang lain, sebagai investor yang erat kaitannya dengan perusahaan dalam menemukan alternatif untuk berinvestasi, investor akan mencari perusahaan yang dikelola secara profesional. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi para investor pemegang saham (*shareholders*) tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Perusahaan di Indonesia termasuk perusahaan di sektor industri manufaktur merupakan industri yang sangat penting karena berperan besar dalam peningkatan perekonomian nasional dan upaya peningkatan investasi di sektor industri, terutama yang berfokus pada ekspor. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau mengolah barang setengah jadi dengan memberikan nilai tambah. Peran penting perusahaan manufaktur juga termasuk kontribusinya dalam perdagangan internasional, yang tidak terlepas dari peningkatan kualitas dan hasil produksi agar dapat bersaing di pasar global, khususnya di sektor industri manufaktur (Reschiwati, 2016).

Ketika persaingan yang semakin ketat sedang terjadi, muncul masalah global baru yang merugikan banyak pihak, termasuk perusahaan sektor industri manufaktur. WHO (*World Health Organization*) secara resmi mengumumkan virus corona ataupun Covid-19 sebagai pandemi global bertepatan pada 11 Maret 2020 (Sebayang, 2020). Pada Siaran Pers Badan Kebijakan Fiskal menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berdampak pada perekonomian.

Penyebaran wabah virus yang telah menyebar luas ini menyebabkan dampak negatif pada perekonomian Indonesia, termasuk dalam bidang investasi, perdagangan, dan pariwisata. Dilihat dari Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) Indonesia mengalami penurunan dari 50,8 pada bulan Agustus menjadi 47,2 pada bulan September 2020. Ini merupakan penurunan pertama sejak bulan April dan menunjukkan pelemahan aktivitas manufaktur akibat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai respons atas tingginya skala pandemi Covid-19 (Kemenperin, 2020)

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pelaksanaan PSBB tersebut tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) Peraturan tersebut merupakan upaya dalam menekan laju penyebaran serta memutus rantai penularan wabah covid-19 ini.

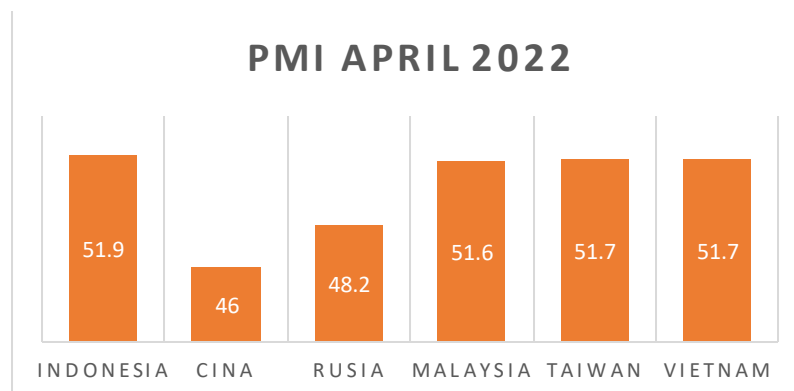
Purchasing Managers Index (PMI) merupakan indikator bagi kegiatan perekonomian suatu negara yang dibuat melalui tahapan survei terhadap para purchasing manager berbagai sektor bisnis yang ada. Angka PMI mengindikasikan seberapa optimis pelaku sektor bisnis terhadap kondisi perekonomian ke depannya. Seringkali, yang menjadi perhatian bagi para investor maupun analis adalah PMI manufaktur. Jika angka indeks diatas 50 menandakan sektor bisnis mengalami ekspansi, sebaliknya jika dibawah 50 menandakan bahwa sektor bisnis mengalami kontraksi.



Sumber: Kementerian Perindustrian

*Gambar 1. 1 Purchasing Managers' Index Perusahaan Manufaktur Indonesia 2021*

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun berikutnya IHS Markit menjelaskan bahwa produksi manufaktur Indonesia meskipun bulan Juli 2021 mengalami kontraksi, tetapi pada bulan September dan Oktober mengalami ekspansi. Kendati demikian, ekspansi output dan produksi November 2021 lebih rendah dari Oktober 2021 namun tetap berada diatas angka 50. Hal ini menunjukkan bahwa pasca pandemi COVID - 19 kualitas perusahaan manufaktur mulai membaik (Kemenperin, 2020)



Sumber: Kementerian Perindustrian

*Gambar 1. 2 Purchasing Managers' Index April 2022 Perusahaan Manufaktur beberapa negara Asia*

Kemudian, pada tahun berikutnya, di tahun 2022 kondisi pengoperasian sektor manufaktur Tanah Air terus membaik. Hal ini tercermin dari indeks *Purchasing*

*Managers' Index* (PMI) Manufaktur Indonesia bulan April 2022 yang mencapai 51,9. PMI Manufaktur Indonesia terus menunjukkan peningkatan, di tengah menurunnya indeks tersebut di negara-negara lainnya, seperti China 48 dan Rusia 48 dimana indeks PMI berada dibawah angka 50. Hal ini menunjukkan bahwa setelah pandemi perusahaan sektor manufaktur di Indonesia mampu bangkit dan mempertahankan perusahaannya(Kemenperin, 2020).

Tabel 1. 1 Nilai Ekspor Perusahaan Manufaktur

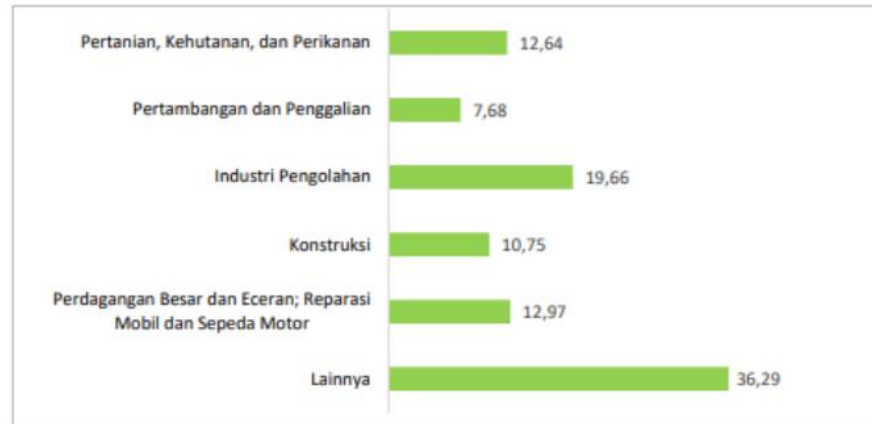
Tahun	Nilai Ekspor	Kenaikan
2020	USD 51,10 Miliar	30,53%
Jan-Mei 2021	USD 66,70 Miliar	

Sumber: Kementerian Perindustrian

Berdasarkan tabel 1.1 selain melihat dari faktor PMI perusahaan manufaktur, faktor lain yang menjadi peranan penting perusahaan manufaktur yaitu terlihat pada nilai ekspor. Pada tahun 2021, nilai ekspor perusahaan manufaktur yang tercatat mencapai USD66,70 miliar pada bulan Januari-Mei, naik 30,53% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar USD51,10 miliar. Dari capaian USD66,70 miliar tersebut, industri pengolahan memberikan kontribusi paling tinggi, yakni 79,42% dari total ekspor nasional yang berada diangka USD83,99 miliar. Besarnya proporsi ekspor produk industri pengolahan sekaligus menggambarkan bahwa telah terjadi pergeseran ekspor Indonesia dari komoditas primer kepada produk manufaktur yang bernilai tambah tinggi. Artinya, Indonesia telah melakukan transformasi ekonomi, tidak lagi menjadi negara pengekspor bahan mentah, tetapi menjadi negara pengekspor produk jadi atau barang setengah jadi.

Berkaitan dengan hal tersebut, meskipun sedang berada pada kondisi pasca pandemi Covid-19, Indonesia masih memiliki daya tarik bagi investor dengan besarnya pasar yang dimiliki, sumber daya yang melimpah, pertumbuhan ekonomi serta adanya dukungan regulasi dari pemerintah. Investasi juga merupakan salah satu motor

pendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta sekaligus akan menyerap tenaga kerja di sektor industri. Selain dilihat dari PMI dan nilai ekspor, perusahaan manufaktur juga menjadi sektor usaha penyumbang PDB terbesar. Sektor industri masih memberikan kontribusi terbesar pada struktur Produk Domestik Bruto (PDB) secara Nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 3 Rata-Rata Distribusi PDB Tahun 2018-2021 (Persen)

Pada gambar 1.3 menunjukkan Lapangan Usaha Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar di setiap triwulan dengan rata-rata kontribusi sebesar 19,66%. Selain itu, Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 12,97%, diikuti Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 12,64%.

Oleh karena dominasi peran perusahaan manufaktur sebagai penyumbang PDB, nilai ekspor, dan dinamika ekspansi-kontraksi PMI perusahaan manufaktur maka diperlukan sebuah evaluasi dengan pendekatan ilmiah dan analisis untuk memetakan dampak Covid-19 terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur. Kegiatan analisis kinerja keuangan sendiri merupakan kegiatan yang akan memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan atas pro dan kontra kondisi keuangan perusahaan yang menggambarkan prestasi kerja selama periode tertentu. Hal ini sangat

penting agar sumber daya dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi perubahan (Fahmi, 2011). Kinerja keuangan suatu perusahaan biasanya tercermin dalam laporan keuangan yang disusun secara periodik. Laporan keuangan menyediakan informasi yang penting untuk menganalisis kesehatan keuangan perusahaan. Melalui analisis laporan keuangan, para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditur, dan analis keuangan, dapat menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan menyediakan informasi penting yang digunakan untuk mengukur profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi operasional perusahaan.

Salah satu cara untuk menganalisis kondisi suatu perusahaan adalah melalui analisis rasio. Rasio keuangan berfungsi untuk memperlihatkan pencapaian perusahaan dalam periode tertentu dan memberikan gambaran mengenai risiko yang dihadapi perusahaan dalam jangka waktu tertentu di masa depan. Terdapat beberapa macam rasio keuangan yang umumnya digunakan dalam analisis laporan keuangan, yaitu rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio likuiditas. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio profitabilitas juga dikenal sebagai rasio rentabilitas. Selain untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan melalui seluruh kapasitas dan sumber dayanya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aktiva dan penggunaan modal. (Hery, 2016)

Banyaknya jumlah perusahaan manufaktur di Indonesia menyebabkan persaingan antar perusahaan semakin ketat. Kinerja keuangan perusahaan manufaktur dalam 3 tahun terakhir yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA) mengalami penurunan. Berikut ini terdapat tabel data fenomena turunnya kinerja keuangan perusahaan berdasarkan *Return On Asset* manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2021

Tabel 1. 2 Return On Asset (ROA) Perusahaan Manufaktur

No	Perusahaan Manufaktur	Return On Assets (ROA)		
		%		
		2019	2020	2021
1.	Sektor Industri Dasar & Kimia	1.022	-0.371	2.802
2.	Sektor Aneka Industri	2.008	-0.818	0.899
3.	Sektor Barang Konsumsi	4.850	7.281	3.788
	<b>Total Rata-Rata</b>	<b>0.003</b>	<b>-0.001</b>	<b>0.009</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 1.1, Badan Pusat Statistik telah melakukan analisis secara runtun waktu terhadap besaran nilai ROA (*Return on Assets*) perusahaan pada subsektor tersebut. Dalam hasil analisis tersebut, ditemukan bahwa terdapat titik stasioner nol hingga 10% pada nilai ROA perusahaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan perusahaan dalam subsektor tersebut cenderung kurang baik. Situasi ini menjadi perhatian, terutama bagi sektor-sektor tertentu seperti infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Sektor-sektor ini telah mengalami kontraksi yang cukup signifikan sejak triwulan IV 2019. Kontraksi ini kemungkinan besar disebabkan oleh adanya proyek-proyek konstruksi yang berjalan secara masif, namun proyek-proyek tersebut bersifat jangka panjang. Artinya, kontraksi yang terjadi merupakan bagian dari proses berlangsungnya investasi dalam sektor ini. Namun, kondisi ini juga memiliki risiko yang tinggi, terutama jika perusahaan-perusahaan di sektor ini tidak mampu mempertahankan pendapatan mereka. Kekurangan pendapatan ini bisa berujung pada risiko kebangkrutan bagi perusahaan-perusahaan tersebut. (Badan Pusat Statistik, 2020)

Pandemi menunjukkan dampaknya pada nilai ROA perusahaan. Nilai ROA selama 2020 pada hampir seluruh sektor bernilai negatif. Dengan demikian adanya

penurunan pendapatan yang dirasakan selama masa pandemi. Kondisi ini bahkan sudah dimulai sejak tahun 2019 pada kuartal keempat. Kondisi ini menyebabkan tahun 2020 mungkin merupakan tahun yang cukup buruk bagi perusahaan di Indonesia. Optimis memulai kembali terbangun pada tahun 2021. Hingga kuartal 3 tahun 2021, sudah terdapat sinyal peningkatan nilai ROA dari masing-masing sektor. Hal ini merupakan salah satu sinyal dalam perbaikan perekonomian pasca pandemi. Melihat kondisi agregat tahunan, pada tahun 2020, nilai ROA dari seluruh sektor tergolong sangat buruk. Tercatat delapan dari sembilan sektor mengalami penurunan nilai ROA. Penurunan nilai ROA apalagi menuju kepada nilai negative menunjukkan ketidakmampuan sektor dalam mengendalikan asset untuk produksi dan menghasilkan nilai tambah. Hal ini sangat relevan dengan kondisi pandemi, mengingat bahwa pada tahun 2020, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi c-to-c sebesar -2,07 persen. Kondisi yang baik justru dialami oleh sektor industri barang konsumen. Jika melihat trennya selama 2017 hingga 2021, tahun 2020 merupakan titik tertinggi yang cenderung merupakan nilai spike. Hal ini menunjukkan adanya demand yang sangat tinggi pada produk sektor industri barang konsumen pada masa pandemic (Badan Pusat Statistik, 2020)

Berkaitan dengan kinerja keuangan dan analisisnya terhadap laporan keuangan, diperlukan transparansi yang baik bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk dapat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya mengenai kinerja keuangan perusahaan. Hal ini membantu meningkatkan kepercayaan dan minat investor, yang dapat berdampak positif pada akses perusahaan terhadap modal dan harga saham yang lebih tinggi. Transparansi tersebut dapat terwujud jika menerapkan *Good Corporate Governance*. Menurut Forum for Corporate Governance Indonesia (2001) mendefinisikan GCG sebagai suatu aturan yang mengendalikan perusahaan dengan menjaga hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban.



Penerapan GCG secara optimal dapat menarik dan mendatangkan calon investor karena perusahaan dipandang telah berupaya guna memaksimalkan pengambilan keputusan sehingga penilaian perusahaan tersebut akan meningkat (Krisnando & Sakti, 2019). Sebaliknya, penerapan GCG yang tidak optimal dan lemah menyebabkan adanya ketimpangan dan memicu terjadinya berbagai masalah keuangan. Realita yang sering dijumpai yaitu banyak perusahaan yang gulung tikar karena tidak dapat mengoptimalkan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Emirzon, 2006). Maridkha & Himmati (2021) dalam penelitiannya menyatakan hal serupa bahwa lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* suatu perusahaan akan berdampak kepada kondisi keuangan yang memburuk sehingga akan menimbulkan masalah seperti kasus tindakan korupsi, kejahatan penggelapan ataupun tindakan kejahatan lainnya yang berakibat merugikan perusahaan.

Berdasarkan riset *Corporate Governance Watch* atau CG Watch yang dilakukan oleh ASEAN *Corporate Governance Association* (ACGA) pada tahun 2018, Indonesia berada diperingkat terakhir dalam pelaksanaan GCG di antara 12 negara, yaitu Australia, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Taiwan, Thailand, India, Jepang, Korea, China, dan Filipina. Merujuk pada riset tersebut terdapat beberapa kasus yang mencerminkan lemahnya implementasi GCG di Indonesia pada tahun 2018 misalnya yang dialami PT Lippo Karawaci Tbk yang mengalami permasalahan korupsi karena terkuaknya fakta bahwa anak perusahaannya melakukan tindak pidana rasuah berupa suap untuk perizinan proyek Meikarta. Masih pada tahun yang sama, kasus fraud dan rekayasa laporan keuangan yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia. Kementerian keuangan mengeluarkan keputusan mengenai terjadinya kasus tersebut dengan menyatakan bahwa PT Garuda Indonesia melakukan pelanggaran Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan diberikan Sanksi Administratif berupa denda sebesar Rp100 juta. Hal ini menjadi bukti rendahnya

kesadaran terhadap penerapan seluruh aspek *Good Corporate Governance* berdampak kepada maraknya kasus korupsi, fraud ataupun tindak pidana penyelewengan lainnya.

Penerapan prinsip-prinsip GCG yang tidak dilakuan dengan baik dan benar akan berdampak buruk bagi perusahaan baik secara finansial maupun non-finansial, termasuk turunnya kredibilitas dan reputasi perusahaan di mata para pemangku kepentingan. Ketidakesuaian praktik GCG menyebabkan adanya ketidakseimbangan yang harus diperbaiki dengan mengacu kepada lima prinsip *Good Corporate Governance* yaitu, transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) (Emirzon, 2006). Dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai prinsip-prinsip GCG dibutuhkan keterlibatan dari setiap peran yang akan menjalankan tata kelola perusahaan. Shleifer & Vishny (1997) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* dianggap sebagai suatu mekanisme yang dapat melindungi pihak minoritas dari pengambilan alih yang dilakukan oleh para manajer serta pemegang saham yang mempunyai andil dengan menekankan pada mekanisme legal. Perusahaan diharapkan dapat menerapkan *Good Corporate Governance* beserta prinsip-prinsip GCG yang ada seperti transparansi dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijalankan dan dikendalikan ketika perusahaan memiliki suatu pengelolaan yang baik.

Tujuan dari *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Secara teoritis, pelaksanaan corporate governance dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya good corporate governance dapat meningkatkan kepercayaan investor.

Implementasi GCG dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Selain tata kelola yang baik, faktor lain yang dapat memoderasi adalah ukuran perusahaan terhadap mempengaruhi profitabilitas perusahaan adalah ukuran perusahaan. Hartono (2008) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan (*firm size*) adalah besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aset atau besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aset. Penentuan ukuran perusahaan dapat dinyatakan dengan total penjualan, total aset, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata tingkat aset. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan atau total aset perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan selama akhir periode audit (Agnes, 2011).

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel moderasi karena ukuran perusahaan dapat mempengaruhi efisiensi operasional dan kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan skala ekonomi. Perusahaan yang lebih besar memungkinkan untuk memiliki akses ke sumber daya dan pasar yang lebih besar, yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka. Dalam konteks GCG, efek skala dapat berdampak pada bagaimana praktik GCG diterapkan dan diintegrasikan dalam struktur organisasi. Perusahaan dengan total aset yang besar akan mencapai tahap dimana perusahaan memiliki arus kas positif dan dianggap baik prospek dalam jangka waktu yang relatif lama, tetapi juga mencerminkan hal perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aset kecil (Moeljadi dan Supriyati, 2014)

Penelitian tentang GCG dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan telah banyak dilakukan, dengan hasil berbeda-beda. Penelitian (Peng et al., 2021) menunjukkan hubungan linier positif antara ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan. Setiawan & Setiadi (2020) menunjukan bahwa GCG yang terdiri dari komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Brayen Prastika (2015) dalam

penelitiannya memaparkan bahwa dengan menggunakan pengukuran Tobins Q membuktikan yakni dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan Kota & Tomar (2010) menjelaskan bahwa ada hubungan yang signifikan antara ukuran dewan komisaris dan kinerja keuangan perusahaan. (Deswara et al., 2021) dalam penelitiannya memaparkan bahwa kepemilikan institusional sebagai proksi dari variabel GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA yang dijadikan sebagai tolak ukur pada variabel kinerja keuangan. Laksono & Kusumaningtias (2021) menyatakan bahwa good corporate governance tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Situmorang & Simanjuntak (2019) Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa persentase kepemilikan institusional, komposisi dewan direksi, dan komposisi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan dengan arah koefisien negatif terhadap ROE. sedangkan secara simultan persentase kepemilikan institusional, komposisi dewan direksi dan komposisi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap ROE dengan arah koefisien positif. Maridkha & Himmati (2021) Hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate governance berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan secara parsial kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Adanya *research gap* pada penelitian sebelumnya menunjukkan inkonsistensi pada penelitian terdahulu mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi yang diduga mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara *Good Corporate Governance* yang diproksikan oleh ukuran dewan komisaris dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian tersebut dengan didukung oleh adanya *research gap* dari penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti akan menguji kembali variabel- variabel yang telah diteliti sebelumnya yaitu kinerja keuangan dan *good corporate governance*. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN**

Nafisa Shafa Salsabilla, 2023

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## **PERUSAHAAN DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2021-2022)”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan
2. Mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan
3. Mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan
4. Mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi literasi tambahan dan referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, khususnya *Good Corporate Governance* dan ukuran perusahaan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi bagi pihak yang berkaitan mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan

manufaktur, sehingga kedepannya dapat membuat kebijakan yang tepat bagi kemajuan perusahaan tersebut.